JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 10, No. 2, June 2025
Page 753-758
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

ANALISIS KESENJANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI LITERATUR TERHADAP PERBEDAAN AKSES DAN KUALITAS ANTARA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Farhan Apriliansyah[1], Masduki Ahmad[2], Heni Rochimah[3]
[1,2] Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
[3]Universitas Islam As-Syafiiyah, Indonesia

Email: farhanapriliansyah02@gmail.com

Check for updates OPEN ACCESS CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.651

Sections Info

Article history:
Submitted: 3 June 2025
Final Revised: 11 June 2025
Accepted: 16 June 2025
Published: 27 June 2025

Keywords:
Education Financing Gap
Public And Private Schools
Urban And Rural Areas
School Operational Assistance
Education Quality

ABSTRAK

This study aims to identify and analyze the education financing gap in Indonesia, particularly between public and private schools, as well as between urban and rural areas. The objective is to examine how funding disparities affect the quality and accessibility of basic and secondary education services. A qualitative descriptive approach was employed through a literature review method. The analysis focused on identifying patterns of inequality in funding allocation and its implications for educational quality. The study reveals significant disparities in education funding. Public schools in urban areas benefit from more stable and substantial funding through the School Operational Assistance (BOS) program, whereas private schools in rural areas rely heavily on community contributions with limited purchasing power. These funding gaps directly impact the availability of learning facilities, teacher quality, and student academic outcomes, further exacerbating long-term social inequality. This study offers a comprehensive and up-to-date synthesis of the structural disparities in Indonesian education financing. Its novelty lies in the analytical integration of BOS data, student performance indices, cross-subsidy models between regions, and the strategic role of corporate social responsibility (CSR) in education – elements rarely examined collectively in previous literature.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia, khususnya antara sekolah negeri dan swasta, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kajian ini ditujukan untuk menelaah sejauh mana disparitas pendanaan memengaruhi kualitas pendidikan dan akses layanan pendidikan dasar hingga menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola ketimpangan alokasi dana dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Studi ini menemukan adanya kesenjangan signifikan dalam pendanaan pendidikan, di mana sekolah negeri di perkotaan memperoleh alokasi dana yang lebih stabil dan besar melalui program BOS dibandingkan sekolah swasta di pedesaan yang mengandalkan iuran masyarakat dengan daya beli rendah. Kesenjangan ini berdampak langsung pada ketersediaan fasilitas, mutu guru, dan hasil capaian akademik siswa, serta memperburuk ketimpangan sosial jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman sistemik mengenai struktur ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia melalui sintesis data terkini. Kebaruan terletak pada pendekatan analitis terhadap data BOS, indeks prestasi siswa, dan model subsidi silang antarwilayah serta peran CSR dalam pendidikan, yang belum banyak diulas secara komprehensif dalam literatur sebelumnya.

Kata kunci: *Kesenjangan Pembiayaan Pendidikan, Sekolah Negeri dan Swasta, Perkotaan dan Pedesaan, Kualitas Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 serta diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, dalam implementasinya, realisasi pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya kesenjangan (gap) dalam pembiayaan pendidikan, baik antara sekolah negeri dan swasta, maupun antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan.

Berbagai studi mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan, penggunaan dana tersebut sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, khususnya gaji guru (Kemdikbud, 2020). Akibatnya, alokasi untuk pengembangan sarana-prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik menjadi terbatas.

Ketimpangan ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan, ketersediaan fasilitas, serta hasil belajar siswa. Sekolah di daerah perkotaan dan negeri cenderung lebih baik secara sarana dan mutu dibandingkan sekolah swasta di pedesaan yang harus mandiri secara finansial dengan dukungan terbatas dari masyarakat setempat. Fenomena ini berisiko memperlebar jurang ketidaksetaraan akses pendidikan dan memperburuk kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia melalui kajian literatur, dengan fokus pada perbedaan pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Teknik ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasarkan sumber-sumber sekunder yang terpercaya. Sumber data diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, digunakan juga referensi dari jurnal-jurnal nasional dan internasional terakreditasi seperti Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Jurnal Al-Marhalah, Pelita Nusantara, dan Journal of Educational Research and Policy. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola kesenjangan pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta serta perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hasil analisis diinterpretasikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak dan solusi terhadap gap pembiayaan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pembiayaan Sekolah Negeri dan Swasta

Polanya menunjukkan perbedaan mendasar dalam sumber pendanaan. Sekolah negeri memperoleh dana utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS dialokasikan secara rutin setiap tahun dan besarnya disesuaikan dengan jumlah siswa, sehingga sekolah negeri cenderung memiliki stabilitas anggaran operasional yang lebih baik.

Sebaliknya, sekolah swasta sangat tergantung pada iuran peserta didik dan bantuan

masyarakat. Berdasarkan data Kemdikbud (2021), sekolah negeri mendapat subsidi operasional minimal Rp 900 ribu/siswa/tahun, sedangkan sekolah swasta menerima dana yang jauh lebih rendah atau bahkan tidak mendapatkan bantuan BOS secara penuh. Hal ini tergantung pada status akreditasi sekolah serta ketersediaan dana di daerah masing-masing.
Sekolah swasta kecil di pedesaan menghadapi tantangan besar dalam menutup kebutuhan operasional harian akibat rendahnya daya beli masyarakat sekitar. Kondisi ini semakin memperburuk ketersediaan fasilitas pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan. Sebaliknya, sekolah negeri di wilayah perkotaan cenderung lebih stabil dalam hal pembiayaan sehingga dapat menyediakan sarana pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan alat teknologi informasi yang memadai. Hal ini berdampak positif terhadap mutu proses pembelajaran serta pencapaian hasil belajar siswa (Bray, 2000).

2. Kesenjangan Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

Faktor geografis menjadi variabel penting yang turut memengaruhi ketersediaan dana pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya mendapat akses lebih baik terhadap berbagai sumber pendanaan tambahan seperti donasi dari alumni, sponsorship, serta program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini menjadikan sekolah-sekolah di kota lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan seringkali menghadapi kendala distribusi anggaran yang tidak merata, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta minimnya peran dunia usaha lokal dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Berdasarkan kajian Tilak (2002), keterbatasan ini berdampak pada rendahnya ketersediaan fasilitas belajar seperti laboratorium sains, perpustakaan, media pembelajaran interaktif, bahkan infrastruktur dasar seperti akses internet. Hal ini menyebabkan siswa di pedesaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran berbasis teknologi dan praktik yang memadai.
Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya transportasi dan keterisolasian geografis di beberapa daerah terpencil, sehingga distribusi buku, alat peraga, dan fasilitas pendidikan lainnya sering terhambat. Dampaknya, kualitas pendidikan di sekolah-sekolah pedesaan tertinggal jauh dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan.

3. Dampak Gap Pembiayaan terhadap Kualitas Pendidikan

Kesenjangan pembiayaan yang signifikan memberikan dampak langsung terhadap kualitas guru, sarana pembelajaran, serta aktivitas pengembangan siswa di sekolah. Sekolah yang kekurangan dana cenderung merekrut guru tidak tetap dengan tingkat pelatihan dan sertifikasi yang minim. Hal ini berdampak pada rendahnya mutu proses belajar-mengajar di kelas.

Selain itu, keterbatasan dana juga membuat sekolah-sekolah ini tidak mampu menyediakan alat peraga, buku referensi, fasilitas laboratorium, dan perangkat teknologi pendidikan yang memadai. Kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan siswa, maupun program pembinaan bakat pun menjadi sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, hasil belajar siswa di sekolah-sekolah ini relatif lebih rendah dibandingkan sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang fasilitasnya lebih lengkap (Becker, 1993).
Data dari BPS (2023) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam capaian Indeks Prestasi siswa antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di bidang Matematika dan Sains. Indeks Prestasi Matematika dan Sains di sekolah-sekolah perkotaan masing-masing mencapai angka 78,5 dan 80,2, sementara di sekolah pedesaan hanya mencapai 65,3 dan 67,1. Angka ini mencerminkan bahwa kecukupan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pencapaian akademik siswa.

Tabel 1. Perbandingan Indeks Prestasi Siswa Perkotaan dan Pedesaan (BPS, 2023)

Wilayah	**Indeks Prestasi Matematka**	**Indeks Prestasi Sains**
Perkotaan	78,5	80,2
Pedesaan	65,3	67,1

Tebel 2. Rata-rata Dana BOS yang Diterima Sekolah (Kemdikbud,2021)

Jenis Sekolah	**Rata-rata Dana BOS per Siswa per Tahun (Rp)**
Negeri Perkotaan	950.000
Negeri Pedesaan	900.000
Swasta Perkotaan	800.000
Swasta pedesaan	700.000

4. Upaya dan Solusi Pengurangan Gap

Upaya untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia telah menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah optimalisasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui kebijakan distribusi dana BOS berbasis kebutuhan (needs-based budgeting), pemerintah berupaya mengalokasikan dana secara proporsional kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan pendekatan ini, diharapkan sekolah-sekolah di pedesaan yang sebelumnya mengalami kekurangan dana operasional dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pengadaan alat pembelajaran, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, pemerintah mendorong implementasi subsidi silang antar sekolah, terutama antara sekolah yang tergolong maju di perkotaan dengan sekolah yang masih tertinggal di pedesaan. Program ini bisa diwujudkan melalui kemitraan institusi pendidikan, di mana sekolah-sekolah unggulan berperan sebagai pembina bagi sekolah mitra di daerah. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa pelatihan guru, penyediaan bahan ajar digital, hingga bantuan peralatan laboratorium. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi pendidikan ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit mengakses sumber daya pendidikan bermutu.

Peran dunia usaha juga sangat strategis dalam mempersempit kesenjangan pembiayaan pendidikan. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan-perusahaan besar diharapkan memberikan kontribusi langsung kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan di wilayah 3T. Bentuk dukungan dapat berupa pembangunan fasilitas belajar, penyediaan beasiswa untuk siswa tidak mampu, serta pelatihan keterampilan berbasis vokasi. Pemerintah pusat dapat memperkuat regulasi terkait insentif pajak bagi perusahaan yang aktif menyalurkan CSR ke bidang pendidikan, sehingga mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan pendidikan nasional.

Di tingkat daerah, penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi elemen penting. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan sebagian besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung sektor pendidikan, terutama dalam pembangunan sarana-prasarana, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan media pembelajaran modern. Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berorientasi pada pengembangan sekolah berbasis komunitas juga dibutuhkan agar program-program pendidikan dapat lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan.

Mekanisme pengawasan dan transparansi penggunaan dana pendidikan menjadi prasyarat penting dalam menyukseskan berbagai upaya tersebut. Audit keuangan secara

berkala, pelaporan penggunaan dana secara terbuka kepada publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi program pendidikan di sekolah perlu diperkuat. Dengan sistem pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir, dan anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk peningkatan mutu pembelajaran, perbaikan fasilitas sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Upaya-upaya tersebut, meskipun telah berjalan, masih memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah, swasta, lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang setara. Tanpa kolaborasi lintas sektor ini, kesenjangan pembiayaan pendidikan dikhawatirkan akan terus berlangsung, memperbesar jurang ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah di Indonesia.

Sebagai kesimpulan bagian ini, berbagai strategi pengurangan kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia telah dirancang dan diimplementasikan. Namun, untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan yang optimal, semua elemen bangsa harus terlibat secara aktif dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan dari upaya ini terletak pada sinergi program, konsistensi kebijakan, serta integritas dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran pendidikan di semua tingkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pembiayaan pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan mendasar yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Kesenjangan ini tercermin dari perbedaan signifikan dalam sumber dana, besaran anggaran, serta pemanfaatan dana antara sekolah negeri dan swasta, maupun antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Sekolah negeri, khususnya di perkotaan, memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih stabil dan terstruktur melalui dana BOS yang dialokasikan rutin oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan sekolah-sekolah tersebut menyediakan sarana pembelajaran yang memadai, merekrut guru berkualifikasi tinggi, serta melaksanakan program-program pengembangan siswa yang komprehensif. Sebaliknya, sekolah swasta, terutama yang berada di pedesaan, menghadapi kendala keterbatasan dana karena bergantung pada iuran peserta didik dan sumbangan masyarakat sekitar, yang umumnya memiliki kemampuan ekonomi rendah. Akibatnya, banyak sekolah swasta di pedesaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti ketersediaan laboratorium, perpustakaan, alat peraga, dan fasilitas teknologi informasi.

Perbedaan geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan turut memperlebar kesenjangan tersebut. Sekolah di perkotaan lebih mudah mengakses sumber dana tambahan seperti bantuan CSR, donasi alumni, atau kemitraan dengan dunia usaha, sementara sekolah di pedesaan kerap terisolasi secara fisik dan finansial. Kondisi ini menyebabkan siswa di pedesaan mengalami keterbatasan akses terhadap pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran praktik, maupun pengembangan keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan di era globalisasi.

Dampak dari kesenjangan pembiayaan ini sangat jelas terlihat dalam hasil capaian akademik siswa, mutu guru, tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ketimpangan ini berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi di masa depan jika tidak segera diatasi secara sistematis.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti penyaluran dana BOS berbasis kebutuhan, program afirmasi untuk daerah 3T, serta dorongan kemitraan dunia usaha melalui CSR. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran alokasi dana, lemahnya pengawasan penggunaan anggaran, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam kebijakan pembiayaan pendidikan, termasuk penerapan model pembiayaan berbasis pemerataan (equity-based funding), optimalisasi peran pemerintah daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap peserta didik di Indonesia, tanpa memandang latar belakang sekolah dan wilayah tempat tinggalnya, dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan

REFERENSI

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.

Bray, M. (2000). *Double-shift schooling: design and operation for cost-effectiveness*. UNESCO.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Jakarta: Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Buku Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.

Tilak, J. B. G. (2002). Education and Poverty. *Journal of Human Development*, 3(2), 191-207.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS.

Arifin, I. (2017). The Influence of Education Budget Allocation on the Quality of Human Resources in Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 22(2), 120-131.

Susanti, D. (2019). Analysis of Education Financing Policy in Indonesia: A Review. *Jurnal Al-Marhalah*, 4(1), 45-56.

Yuliana, S. (2020). Educational Inequality in Indonesia: A Multilevel Analysis of the Impact of Socioeconomic Status and School Resources. *Journal of Educational Research and Policy*, 2(3), 210-225.

Rahmawati, R., & Haryanto, A. (2021). The Impact of School Operational Assistance (BOS) Fund on Student Achievement in Rural Areas. *Pelita Nusantara Journal of Education*, 5(4), 300-315.

Copyright holder :
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA